



PELAKSANAAN PENYALURAN BANSOS KARTU TANI OLEH BANK BNI DI KABUPATEN SITUBONDO**Oleh****Rian Agus Prakoso¹, Ita Uzzakah², Samsul Hadi³**^{1,2}Pendidikan Ekonomi STKIP PGRI Situbondo, Indonesia³Pendidikan Matematika STKIP PGRI Situbondo, IndonesiaEmail: ¹rianagus@gmail.com, ²itauzzakah69@gmail.com, ³adikeciel285@gmail.com

Article History:

Received: 25-02-2023

Revised: 17-03-2023

Accepted: 27-03-2023

Keywords:Penyaluran, Kartu Tani,
Pupuk Bersubsidi

Abstract: Kebijakan yang dilakukan oleh pemerintah untuk mengurangi kasus penyalahgunaan dan kelangkaan pupuk bersubsidi adalah dengan adanya program pupuk bersubsidi melalui kartu tani yang digagas berdasarkan peraturan kementerian pertanian Nomor 47 Tahun 2017 tentang alokasi dan harga eceran tertinggi pupuk bersubsidi sektor pertanian TA 2018. Pemerintah melalui Kementerian Pertanian bekerja sama dengan Kementerian BUMN dan Pemerintah Daerah melaunching Kartu Tani untuk wilayah Jawa Timur di Kabupaten Situbondo. PT Bank Negara Indonesia bekerja sama dengan Dinas Pertanian dalam program penyaluran Kartu Tani di Kabupaten Situbondo. Dengan adanya kebijakan Kartu Tani ini diharapkan dapat menjamin penyaluran pupuk bersubsidi agar tepat sasaran dan memudahkan pengawasan peredarannya.

PENDAHULUAN

Indonesia sebagai negara agraris yang sebagian besar masyarakatnya menjadikan sektor pertanian sebagai salah satu sumber perekonomian yang sangat potensial dalam pertumbuhan dan perkembangan ekonomi para petani. Dalam fokus pemerintah, pembangunan di sektor pertanian bertujuan untuk menciptakan ketahanan pangan dan meningkatkan kesejahteraan para petani. Pertanian merupakan bidang ekonomi yang memberikan kontribusi besar terhadap perekonomian negara. Namun secara taraf hidup bermasyarakat, kesejahteraan petani belum meningkat secara merata dibandingkan dengan pekerja di sektor industri dan perdagangan. Para petani juga sangat menyayangkan harga pupuk yang semakin mahal sebagai salah satu komponen yang sangat penting untuk membantu menyuburkan komoditas seperti padi, jagung, cabai, dan lain-lain sehingga produktivitas di sektor pertanian mengalami penurunan secara signifikan.

Seperti yang tertera dalam Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2013 tentang Perlindungan dan Pemberdayaan Petani, yakni Pemerintah sebagai badan utama penyelenggara negara memegang peranan yang sangat penting dalam menciptakan kesejahteraan petani. Pupuk merupakan unsur yang tidak bisa di hilangkan dalam proses produksi tanaman yang bertujuan untuk meningkatkan kualitas dan jumlah dari hasil pertanian. Ketersediaan pupuk bagi petani adalah salah satu unsur penting yang harus dapat dijamin oleh pemerintah.

Untuk mengatasi masalah ini, pemerintah memberlakukan program pupuk subsidi



guna menstabilkan sekaligus meningkatkan produktivitas di sektor pertanian. Kebijakan ini merupakan sebuah program yang diadakan oleh pemerintah dengan tujuan meningkatkan kualitas serta produktivitas di sektor pertanian sebagai salah satu mata pencaharian masyarakat di Indonesia.

Kebijakan suplementasi pupuk di Indonesia telah diterapkan sejak tahun 1970-an hingga saat ini. Dalam menjamin ketersediaan pupuk bersubsidi, maka pemerintah melakukan upaya pengawasan terhadap alokasi pupuk bersubsidi melalui Presiden RI No.15 Tahun 2011 Tentang Perubahan Atas Peraturan Presiden Nomor 77 Tahun 2005 Tentang Penetapan Pupuk Bersubsidi Sebagai Barang Pada Pengawasan. Kebijakan pupuk bersubsidi bertujuan untuk menyediakan pupuk dengan harga murah bagi petani dengan kepemilikan lahan kurang dari 2 Ha. Hal tersebut juga sesuai dengan amanat pemerintah melalui Peraturan Menteri Pertanian Nomor 47/Permentan/SR.310/12/2017 Tentang Alokasi dan Harga Eceran Tertinggi (HET) Pupuk Bersubsidi untuk Sektor Pertanian Tahun Anggaran 2018, sehingga pupuk bersubsidi dapat terjamin ketersediaannya dan harganya sesuai Harga Eceran Tertinggi (HET) pupuk.

Mekanisme penyusunan kebutuhan pupuk bersubsidi bagi kelompok tani disusun melalui musyawarah yang dipimpin oleh ketua kelompok tani dengan didampingi penyuluh, untuk selanjutnya dimasukkan dalam Rencana Definitif Kebutuhan Kelompok (RDKK). Pengusulan RDKK dari kelompok tani tersebut direkap secara berjenjang mulai dari tingkat desa, kecamatan, kabupaten/kota dan provinsi untuk mendapat persetujuan dari Dinas Pertanian setempat. Penyusunan RDKK dilakukan dengan mengacu pada Peraturan Menteri Pertanian Nomor 67/Permentan/SM.050/12/2016 tentang Pembinaan Kelembagaan Petani. Penyaluran pupuk bersubsidi dilaksanakan dengan sistem tertutup berdasarkan RDKK dengan HET sebagaimana ditetapkan dalam Peraturan Menteri Pertanian tentang Alokasi dan HET Pupuk Bersubsidi untuk sektor pertanian.

PT Bank Negara Indonesia bekerja sama dan dipercaya untuk membangun dan mendorong kesejahteraan para petani dalam program penyaluran Kartu Tani di Jawa Timur, salah satunya di Kabupaten Situbondo. Hal ini merupakan salah satu bentuk dukungan BNI terhadap program ketahanan pangan di Indonesia. Kartu tani menjadi sarana akses layanan perbankan terintegrasi yang berfungsi sebagai simpanan, transaksi, penyaluran pinjaman hingga kartu subsidi (e-wallet) bagi para petani. Kartu Tani dapat memberikan para petani kepastian alokasi pupuk subsidi dan memudahkan mendapatkan program bantuan lain karena data petani sudah terdapat pada database. Selain itu, Kartu Tani juga memudahkan pengawasan dan evaluasi penyaluran pupuk bersubsidi dan kegiatan pertanian di Indonesia.

Kartu Tani adalah Kartu Debit BNI co-branding yang digunakan secara khusus untuk Membaca alokasi pupuk bersubsidi dan transaksi pembayaran pupuk bersubsidi di Mesin Elektronik Data Capture (EDC) BNI yang ditempatkan dipengecer serta dapat berfungsi untuk melakukan seluruh transaksi perbankan pada umumnya. Kartu Tani ini bertujuan untuk pendistribusian, pengendalian dan pengawasan pupuk bersubsidi kepada para petani yang berhak menerima. Tujuan terwujudnya distribusi pupuk bersubsidi sesuai dengan enam asas tepat yaitu (Jumlah, Jenis, Waktu, Tempat, Mutu dan Harga) serta pemberian layanan perbankan bagi petani.



METODE

Metode yang diterapkan dalam pelaksanaan penyaluran program kartu tani di kabupaten Situbondo adalah sebagai berikut:

1. Penyaluran dilakukan sesuai dengan jadwal yang diterima dari dinas pertanian, dilakukan dikantor desa yang telah terjadwalkan.
2. Sosialisasi dilakukan beberapa tim guna memberi arahan dan menyampaikan persyaratan yang harus dibawa oleh nasabah (petani).
3. Pengumpulan persyaratan berupa fotocopy KTP dan fotocopy KK.
4. Pencocokan data.
5. Pengisian form dan verifikasi data untuk pembukaan rekening dan penyerahan kartu.
6. Menjelaskan fungsi dan kegunaan kartu tani kepada nasabah (petani).

Penentuan petani yang dapat memiliki kartu tani dalam melakukan transaksi pembelian pupuk dikios pengecer adalah sebagai berikut :

1. Petani telah terdaftar pada kelompok tani diwilayah hamparan sawahnya.
2. Nama petani sesuai dengan NIK dan kartu keluarga yang terdaftar di e-RDKK
3. Kelompok tani melalui ketua kelompok meneruskan ke kios pengecer dan distributor pupuk bersubsidi.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Penyaluran pupuk bersubsidi bagi para petani di Kabupaten Situbondo telah menggunakan program kartu tani sejak tahun 2020. Pola distribusi pupuk subsidi ini dilakukan secara bertahap oleh team BNI Situbondo sesuai dengan petunjuk kementerian pertanian. Untuk mendapatkan kartu tani, petani harus melakukan pendataan dan verifikasi data dengan persyaratan petani harus bergabung dalam kelompok tani. Petani mengumpulkan Fotocopy KTP, KK, setoran pajak tanah, bukti sewa, serta menjadi anggota LMDH (tanah hutan). Persyaratan yang diterima oleh Gapoktan akan diteruskan kepada petugas penyuluh lapangan (PPL) untuk dilakukan pendataan dan verifikasi data diantaranya NIK, luas lahan, komoditas dan jenis pupuk.

Telah kita ketahui bersama bahwa zaman sudah berubah keranah yang lebih modern. Termasuk berbagai bantuan yang diberikan oleh pemerintah juga sudah semakin canggih, baik cara penyalurannya maupun alat atau barang yang disalurkan juga semakin modern. Jadi masyarakat diharuskan untuk terus belajar dan mengikuti perkembangan zaman untuk beradaptasi kepada cara hidup yang lebih modern.

Perkembangan teknologi inilah yang menjadi latar belakang terbitnya bantuan sosial dari pemerintah kepada para petani yang berupa kartu tani. Kartu tani ini dimaksudkan untuk mempermudah petani untuk menggunakan kuota bantuan berupa pupuk bersubsidi yang dapat di ambli di kios-kios pertanian, petani akan terbagi menjadi beberapa kelompok tani yang terbagi sesuai wilayah masing-masing. Selain itu, kartu tani ini juga bermaksud untuk memastikan bahwa penerima bantuan benar-benar memanfaatkan bantuan tersebut dengan efisien.

Penyaluran kartu tani kali ini akan dilakukan sebaik mungkin dan seketat mungkin untuk menghindari pihak-pihak yang mengatasnamakan petani tersebut tetapi mereka gunakan secara sepihak atau untuk mencari keuntungan pribadi saja. Tidak bisa kita pungkiri bahwa di kabupaten Situbondo ini tidak semua lapisan masyarakat telah mengerti atau telah beradaptasi dengan perkembangan zaman saat ini. Masih banyak lapisan masyarakat yang



labil dan polos akan kemajuan teknologi, sehingga mereka mudah untuk diperdaya oleh pihak-pihak yang tidak bertanggung jawab dan hanya mengedepankan kepentingan pribadi.

Oleh karena itu, penyaluran kartu tani oleh Bank BNI ini dilakukan oleh beberapa tim penyalur dengan Standard Operasional Procedure (SOP). Tim penyalur bertugas untuk menjelaskan sebagian dari mekanisme kartu tani tersebut, memberikan langkah-langkah yang harus di ambil oleh petani untuk memakai kartu tani ini, kemudian menjadi tugas ketua kelompok tani yang bertanggung jawab atas kelompoknya. Baik penjelasan lebih lanjut dari kartu tani, cara pengecekan aktivasi kartu tani, maupun bagaimana pemanfaatan kuota didalam kartu untuk ditukar pupuk bersubsidi tersebut.

Kartu tani ini diaktifkan oleh kantor Bank BNI pusat, ketua kelompok tani bertugas untuk memandu kelompoknya dalam memeriksa keaktifan kartu tani tersebut.

Penerbitan Kartu Tani dilakukan oleh petugas BNI sesuai jadwal yang sudah didapatkan dari Dinas Pertanian, dan bertahap sesuai dengan desa yang sudah dijadwalkan. Kegiatan ini dilaksanakan selama dua bulan dimulai dengan penjelasan mekanisme oleh PIC dan pengarahan serta pembentukan team di Kantor BNI KC Situbondo. Persiapan penyaluran seperti mencocokkan data dengan jumlah kartu yang ada, Team menuju Desa yang telah dijadwalkan. Pada penyaluran Kartu Tani ini ada beberapa tahapan proses yang dilakukan oleh petugas BNI, yaitu:

1. Pengecekan Kelengkapan Berkas (*POOLING*)

- a). KTP Asli dan fotocopy
- b). Fotocopy kartu keluarga
- c). Surat Kuasa (apabila diwakilkan), Fotocopy KTP Nasabah yang memberi kuasa, dan KTP asli nasabah yang memberi kuasa.

Petani (nasabah) yang sudah hadir diarahkan menuju ke bagian Pooling untuk pengumpulan berkas yang sudah mereka bawa, dan sudah diberitahukan apa saja persyaratan yang harus dibawa sebelumnya oleh ketua kelompok tani masing-masing. Untuk nasabah yang tidak dapat datang langsung ke tempat penyaluran Bansos atau diwakilkan dengan sebab berada di luar kota atau berada di tempat kerja, sedang sakit, maka petugas Bank wajib menanyakan perihal Surat Kuasa. Surat Kuasa diberikan oleh penerima Bansos dan diserahkan kepada perwakilan yang merupakan penerima kuasa dengan syarat penerima kuasa harus dalam satu Kartu Keluarga (KK) dengan penerima Bansos agar penyaluran Bansos dapat dilakukan. Apabila terdapat nasabah penerima Bansos yang pindah kota, tidak bertani Lagi dan meninggal dunia, Maka petugas Bank dilarang melakukan penyaluran Bansos, dan kemudian diharapkan dapat melakukan pemblokiran rekening serta pemusnahan kartu. Apabila terdapat ketidaksesuaian identitas dan tidak lengkap administrasi terhadap nasabah penerima Bansos, seperti: Terdapat perbedaan NIK. Maka, petugas Bank wajib mengirimkan foto KTP yang bersangkutan untuk selanjutnya dilakukan pengecekan terhadap kesesuaian pada GET NIK. Apabila terdapat perbedaan pada ejaan Nama. Maka, nasabah penerima Bansos wajib menyertakan Surat Keterangan Beda Nama dari Desa Setempat. Apabila nasabah penerima Bansos tidak membawa Kartu Keluarga sebagai kelengkapan administrasi, maka petugas Bank diperbolehkan melakukan verifikasi dengan bantuan KTP. Jika nasabah (petani) tidak membawa persyaratan atau tidak lengkap administrasi, seperti tidak membawa KTP ataupun Kartu Keluarga. Maka, nasabah penerima Bansos diwajibkan membawa KTP asli untuk membantu petugas Bank melakukan verifikasi.



2. Verifikasi

- a) Petugas Bank mengisi formulir sesuai berkas yang diterima dari Pooling.
- b) Petugas Bank melakukan verifikasi kepada nasabah penerima Bansos dengan pengecekan ulang terhadap kesesuaian NIK, Tanggal Lahir dan Foto pada KTP dan data.
- c) Pengecekan Terhadap nasabah Bansos yang diwakilkan, dilakukan verifikasi terhadap surat kuasa yang dibawa oleh penerima kuasa.
- d) Pengecekan ulang terhadap Nama Ibu Kandung nasabah penerima Bansos.
- e) Penjelasan ulang secara singkat mengenai kartu tani.

2. Petugas Data

Petugas data dalam tim hanya dilakukan oleh 1 orang saja, yang mana petugas data melakukan cek verifikasi ulang kepada data-data para nasabah yang memiliki masalah seperti beda nama atau beda NIK. Kasus seperti ini sering terjadi dilapangan, sehingga membutuhkan peranan desa dalam menyelesaikan masalah ini. NIK yang berbeda antara KK dan KTP dengan yang tertera dalam RDKK, akan di cek kembali oleh petugas data yang akan melihat ke data pusat. Disinilah peranan petugas data sangat penting karena untuk memastikan bahwa kartu yang tersalur memang diterima oleh nasabah yang tersebut. Perbedaan NIK dan nama yang tidak terlalu jauh membutuhkan surat keterangan dari desa.

Disinilah peranan desa penting bagi tim penyalur dan nasabah yang tersebut, untuk melengkapi data yang harus dilampirkan apabila terdapat beberapa kesalahan. Perbedaan NIK yang sangat jauh akan diverifikasi ulang oleh petugas data, yang mana petugas data akan mengakses data pusat melalui perantara petugas di kantor pusat.

Dari hasil evaluasi terdapat beberapa kendala yang terjadi ketika pelaksanaan penyaluran Kartu Tani di Kabupaten Situbondo. Seringkali terdapat beberapa nasabah yang terdaftar di RDKK tetapi masih berusia kurang dari 17 tahun, sehingga nasabah masih belum memiliki KTP yang menjadi syarat kelengkapan identitas yang harus dipenuhi untuk penyaluran kartu tani tersebut. Banyak petani yang tidak hadir dikarenakan kerja di luar kota, bepergian, sehingga masih banyak kartu yang belum tersalurkan. Banyak penerima yang meninggal dunia, sehingga harus dilakukan penghapusan data serta pemblokiran kartu. Waktu yang kurang maksimal. Proses pencairan kuota kartu tani yang terhambat dan lama, dikarenakan sedikitnya jumlah kartu yang telah tersalurkan. Sehingga beberapa kelompok tani masih belum bisa menggunakan kartu tani ini secara maksimal, bahkan ada yang masih belum bisa di gunakan sama sekali. Kehadiran nasabah penerima kartu tani juga di pengaruhi oleh faktor pekerjaan atau kesibukan nasabah yang beragam, jadwal penyaluran dengan waktu kesibukan masing-masing nasabah yang berbenturan, masalah kesehatan dan keluar kota.

KESIMPULAN

Kegiatan pelaksanaan penyaluran Program Kartu Tani di wilayah Kabupaten Situbondo oleh tim penyaluran kartu tani Bank BNI KC Situbondo berjalan sesuai dengan yang dijadwalkan, terlepas dari beberapa case internal maupun eksternal. Awal kegiatan ini dibuka dengan penjelasan secara singkat mengenai kartu tani tersebut, dan persyaratan kelengkapan identitas yang harus dipenuhi saat pengambilan kartu tani. Nasabah mengumpulkan kelengkapan identitas ke bagian Pooling dan di arahkan kebagian Verifikasi untuk pengecekan ulang terhadap identitas diri dan pengisian formulir. Setelah selesai waktu



penyaluran dilakukan sinkronisasi terhadap formulir dan kartu yang telah keluar untuk pendataan yang akan dimasukkan ke dalam Berita Acara sebagai pelaporan tim penyalur kepada kantor Bank BNI.

Bagi penerima yang memiliki masalah dalam kelengkapan data seperti beda nama atau NIK, data mereka akan diverifikasi ulang oleh petugas data yang akan mencari data yang bermasalah dalam RDKK pusat di kantor. Setelah selesai, baru akan ditentukan petani (nasabah) tersebut merupakan penerima yang sebenarnya atau bukan, dengan lampiran tambahan surat keterangan dari desa.

Saran yang dapat kami sampaikan untuk penyaluran berikutnya:

1. Penyampaian informasi kepada pihak desa oleh petugas dari dinas pertanian dan Bank terkait penyaluran Kartu tani harus lebih efisien, karena untuk meminimalisir ketidakhadiran masyarakat yang memiliki pekerjaan dan kesibukan masing-masing yang berbeda-beda. Agar proses penyaluran kartu tani dapat tersalurkan dengan maksimal dan merata.

Pihak desa seharusnya mengadakan sosialisasi terlebih dahulu sebelum waktu penyaluran kartu tani dilangsungkan. Hal ini bertujuan untuk memberikan pengertian dasar kepada masyarakat tentang kartu tani yang akan disalurkan, dan akan mempercepat jalannya waktu penyaluran karena petugas penyaluran tidak akan terlalu lama menjelaskan mekanisme kartu tani ke persatu nasabah yang hadir. Sehingga semakin banyak nasabah yang hadir tidak akan memakan waktu yang lama dan sesuai waktu penjadwalan.

DAFTAR REFERENSI

- [1] Buku Petunjuk e-Banking penggunaan Kartu Tani
- [2] (2020). Peraturan Menteri Pertanian No.10 Tahun 2020 Tentang Alokasi dan HET Tertinggi Pupuk Bersubsidi Sektor Pertanian.
- [3] Media (2020). BNI Hadirkan Kartu Tani Untuk Meningkatkan Produktivitas Petani.13 juli 2020
- [4] Biroinfrasda Jawa Tengah (2020). Pengertian Kartu Tani. April 2 2021. Retrieved from Pengertian Kartu Tani - Pemerintah Provinsi Jawa Tengah (jatengprov.go.id)
- [5] Direktorat Jenderal Hortikultura Kementerian Pertanian (2020). PDB Triwulan II 2020, Sektor Pertanian Tumbuh Paling Tinggi. April 2 2021. Retrieved from <http://hortikultura.pertanian.go.id/?p=5494>
- [6] Hartatik, W., Husnain, H., & Widowati, L. R. (2015). Peranan Pupuk Organik dalam Peningkatan Produktivitas Tanah dan Tanaman. Jurnal Sumberdaya Lahan, 9(2). Retrieved from: <http://ejurnal.litbang.pertanian.go.id/index.php/jsl/issue/view/JSL%20Vol.9%282%29%20Dec.2015>
- [7] Peraturan menteri pertanian Republik Indonesia Nomor 130 /Permentan /Sr.130/11/2015 *Tentang Kebutuhan Dan Harga Eceran Tertinggi (Het) Pupuk Bersubsidi Untuk Sektor Pertanian Tahun Anggaran 2016.*
- [8] Peraturan Gubernur Tentang Perubahan Atas Peraturan Gubernur Jawa Timur Nomor 84 Tahun 2015 *Tentang Kebutuhan Dan Penyaluran Serta Harga Eceran Tertinggi Pupuk Bersubsidi Untuk Sektor Pertanian Provinsi Jawa Timur Tahun Anggaran 2016.*
- [9] Peraturan Bupati Jember Nomor 49 Tahun 2015 *Tentang Kebutuhan Dan Penyaluran Serta*
- [10] *Harga Eceran Tertinggi Pupuk Bersubsidi Untuk Sektor Pertanian Kabupaten Jember Tahun*



Anggaran 2016.

- [11] Sukartau (2004). Pemasaran Pertanian . Penerbit Ghalia Indonesia
- [12] Devi Nurul Fahmi. Maria. (2020). Persepsi Petani Terhadap Implementasi Kartu Tani (Studi Kasus Desa Kalirejo Kecamatan Pabelan Kabupaten Semarang). Jurnal Agrisep Vol 19 No. 2
- [13] Moko K U. S.B .U. U (2020). Persepsi Petani Terhadap Program Kartu Tani Di Kecamatan Kalijambe Kabupaten Sragen . Agriculture 32(1) – 9



HALAMAN INI SENGAJA DIKOSONGKAN